DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2) Tentang Hak Konstitusional Setiap Warga Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Pasal 5 dan Penjelasannya Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 137.

Peraturan Bupati No.6 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 12 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet.

Adi, Iswandi Likminto. 2013. *Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama.

Djazuli. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana.

Encik M. Fauzan. 2013, "Fungsi Sosiologis UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 (3) Juli 2013. Diakses 18 Juni 2021

Eny Susilowati. (2018). Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Morality : Jurnal Ilmu Hukum, 4(1).

Fahruddin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Masyarakat.* Bandung: Rafika Aditama.

Fakhrullah, Z. A. (1995). *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI NO. 12 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet.

Fauzan, E. M. (2013). Fungsi Sosiologis Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Memenuhi Hak-hak Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, *42*(3), 346-355.

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2001). Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah. *Makalah, Surabaya, November*.

Hafshah muhardiana. *"Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan*

*Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjaudari Ekonomi Islam"*Riau, UIN Sultan Syarif Kasim:2011.

Hasibuan, D. (2011). Evaluasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet Oleh : 2(1), 1–13.

Irwan. 2018, *Dampak Sosial Perubahan Pencaharian Penduduk Lokal Dari Penambang Hutan Ke Perkebunan Karet*. Yogyakarta: Deepublish.

Marhaeni Ria Siombo, 2014, "Tanggungjawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan Di Bidang Kehutanan dan Pertambangan", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 (3) September 2014. Diakses 18 Juni 2021

Moch. Samuel Arifin, 2012, Margareta Rahayuningsih, Sri Ngabekti, "Distribusi Walet (collocalia sp) di Kabupaten Grobongan", Unnes J Life Sci, Vol. 1 (1) (2012). Diakses 18 Juni 2021

Muhamad Sood, 2019, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Munadjad danusaputro, 1985, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Cetakan kedua, Jakarta.

Nursalam Sianipar, 2001, Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah dalam Mengantisipasi Pasar Bebas, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Paton, G.W., 1951. *A Text Book of Jurisprudence*. Oxford: The Clarendon Press.

Poerwadaminta. W.J.S. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Jakarta: PN. Balai Pustaka Jakarta.

Sas Budiarta, S. (2018). Dampak Industri Sarang Burung Walet Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Dusun Tunggun Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Swara Bhumi, 5(8).

Siombo, M. R. (2014). Tanggung Jawab Pemda terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 394-405.

Syahrantau, G., & M.Yandrizal. (2018). Analisis Usaha Sarang Burung Walet di kelurahan Tembilahan Kota (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisno). Jurnal Agribisnis Unisi, 7 No.1(1), 74–85

Tim Pemetaan Sosial Badan Restorasi Gambut. 2018. Profil Desa Peduli Gambut: Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Jakarta: Kemitraan.

Turaina Ayuti; Dani Gardina; Indrawati Yuda Asmara, 2016, "Identifikasi Habitan Dan Produksi Sarang Burung Walet (Collocalia Fuciphaga) Di Kabupaten Lampung Timur", Jurnal UNPAD, Vol. 5 Nomor. Diakses 18 Juni 2021.

Utami, Dea. 2017. *Pengaruh Pajak Sarang Burung Walet Dan Pajak Air Tanah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan*. (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).

Wahyudi, M. 2008. Usaha Walet di Desa Bahaur. Fakultas Syariah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Fakhturi, M. W. 2009. Efektivitas Perda minuman keras terhadap tindak kriminal di Kulon progo (studi terhadap Perda No. 7 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan terhadap minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta:Pustaka Belajar.

Salim, H. S., & Nurbani, E. S. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers.

Siregar, N. F. 2018. Efektivitas Hukum. Sibuhuan: STAI Barumun Raya.

Yakin, S. K. (2017). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. *Badamai Law Journal*, *2*(1), 113-132.

Sandi Prastiyo, A. (2016). *Tanggung Jawab PT. Perkebunan Glenmore dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation).

Pudyatmoko, Y. R.. 2009. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.

Indrati, M. F. 2007. Ilmu Perundang-Undangan Cet. Ke-7. Yokyakarta: Kanisius.

Sanusi, M. (2016) Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Takbir, M. (2016). Analisis Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penataan Minimarket Berjaringan di Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Doctoral dissertation*, Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.